

Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang di Kotaagung Tahun 1942-1945

Cici Putri Febriyani^{1*}, Ali Imron², Muhammad Basri³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

e-mail: ciputcici95@gmail.com, HP. 085268108367

Received: 21 November 2017 Accepted: 28 November 2017 Online Published: 05 Desember 2017

Abstract: *The Japanese Military Occupation in Kotaagung Year of 1942-1945. This study aims to find out the strategies of Japanese military occupation in Kotaagung from 1942-1945. The method used in this study was historical method with data collection techniques were done through literature technique, documentation, interviews, and observation. The data analysis was carried out using qualitative data analysis technique. The results obtained by the author showed that (1.) Establishing a new government initially from the hands of the Dutch occupation to the Japanese military occupation (2.) Establishing military organizations such as Keibodan, Seinendan, Heiho, and Gyugun (3.) Changing the types of plants that was initially for the economy interests to the need of war like castor plants (4.) Developing defense equipments in form of bunkers, tunnels, fortresses, and cave defense.*

Keywords : *japanese military, government, occupation*

Abstrak: **Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang di Kotaagung Tahun 1942-1945.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah strategi pemerintahan pendudukan militer Jepang di Kotaagung Tahun 1942-1945. Metode yang digunakan adalah metode historis dengan teknik pengumpulan data adalah teknik kepustakaan, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil yang didapat oleh peneliti yaitu (1.) Membentuk pemerintahan baru yang awalnya berada di tangan pemerintahan Belanda ke tangan pemerintahan pendudukan militer Jepang (2.) Membentuk organisasi militer seperti *Keibodan, Seinendan, Heiho, dan Gyugun* (3.) Mengganti jenis tanaman yang awalnya untuk kebutuhan ekonomi menjadi kebutuhan perang seperti tanaman jarak (4.) Membangun sarana pertahanan seperti bunker, terowongan, benteng, dan goa pertahanan.

Kata kunci : militer jepang, pemerintahan, pendudukan

PENDAHULUAN

Restorasi Meiji Tahun 1868 memiliki arti yang penting dalam menjadikan Jepang sebagai negara yang besar dengan pembangunan modern. Majunya perkembangan industri membuat Jepang semakin maju dalam bidang kemiliteran. Pembangunan suatu imperium di Asia, Jepang dalam usahanya telah meletuskan suatu perang di Pasifik.

Sebelum dikuasai oleh pemerintahan pendudukan militer Jepang, Indonesia merupakan wilayah dari kekuasaan Kerajaan Belanda. Selama masa kolonialisme Belanda, berbagai kebijakan dikeluarkan dalam mengelola tanah jajahan di Indonesia.

Armada Laksamana Noichi Nagumo pada tanggal 26 November 1941, yang diangkat sebagai panglima operasi bergerak dari Kepulauan Kuril. Kekuatan puluhan kapal perang militer Jepang yang terdiri dari kapal induk, kapal selam, dan tanker. Armada Nagumo berlayar ke arah timur, menyebrangi laut Pasifik melalui jalur pelayaran yang tidak biasa dilayari kapal-kapal. Seminggu kemudian, kira-kira tujuh ratus mil di sebelah utara Pulau Oahu, Hawaii. Pada tanggal 2 Desember 1941, ketika masih dalam pelayaran, Laksamana Nagumo menerima telegram sandi dari Yamamoto agar ia melakukan serangan ke pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor (Marwati Djoened Poespoegoro,dk , 2008 : 1).

Secara mendadak pada tanggal 7 Desember 1941 menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor, Hawaii. Berhasilnya serangan-serangan yang dilakukan Jepang terhadap pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl

Harbor secara efektif menghilangkan ancaman intervensi pihak Amerika terhadap operasi militer yang direncanakan Jepang.

Salah satu sasaran utama Jepang di kawasan selatan adalah Pulau Sumatera. Invasi dan pendudukan Jepang di wilayah Sumatera dapat dibagi ke dalam tiga fase. Pertama, invasi yang dilancarkan pada bulan Februari-Maret 1942 disusul dengan formasi pemerintah pendudukan militer Jepang sampai pertengahan Mei 1943. Kedua, bulan Mei 1943 sampai September 1944. Markas Besar Tentara Angkatan Darat ke-25 (*Tomi Shudan*) dipindahkan dari Singapura ke Bukittinggi, Sumatera Barat. Sumatera dijadikan wilayah otonom yang terpisah dari Malaya dan Jawa. Ketiga, melunaknya sikap pemerintah pendudukan militer Jepang memberikan kemerdekaan kepada Burma dan Filipina, serta menjanjikan hal serupa untuk semua wilayah bekas jajahan Hindia-Belanda. Selain itu, yang terpenting adalah sebagian besar pemuda di kawasan Asia Tenggara diberi kesempatan lebih luas untuk mendapatkan pelatihan militer (Menurut Mestika Zed, 2005 : 11).

Kota Palembang menjadi kota pertama yang diserang dan diduduki oleh Jepang untuk wilayah Sumatera. Menuju wilayah Lampung, pasukan militer Jepang bergerak dari Tulung Buyut bergerak terus menuju Kotabumi dan langsung menuju Telukbetung Tanjungkarang yang saat merupakan pusat pemerintahan Hindia-Belanda di Lampung.

Sebagian tentara Jepang memisahkan diri di wilayah Kotabumi, sedangkan yang sebagian lagi bergerak menuju Krui dan Menggala. Untuk pasukan Udara,

Jepang menurunkan tentaranya di Kota pelabuhan Panjang dan Kotaagung dikarenakan keduanya adalah kota pelabuhan di Lampung Selatan. Dari arah Panjang mereka menyerbu arah Telukbetung-Tanjungkarang, sedangkan yang diterjunkan di wilayah Kotaagung bergerak menuju Talangpadang dan Pringsewu.

Wilayah Lampung kemudian masuk ke dalam kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang. Salah satu wilayah yang ada di Lampung yang memiliki peranan penting pada masa pemerintahan pendudukan militer Jepang adalah Kotaagung. Kotaagung merupakan wilayah paling selatan yang ada di Lampung. Wilayah Kotaagung adalah salah satu pintu masuk Jepang ketika menguasai wilayah Lampung. Wilayah Kotaagung adalah salah satu daerah yang sangat strategis.

Pemerintahan pendudukan militer Jepang di Kotaagung memiliki nilai yang strategis dalam upayanya menghadapi Sekutu dalam Perang Asia Pasifik. Wilayah Kotaagung merupakan wilayah dengan tanah yang subur dan penduduk yang banyak. Jepang berusaha mengeksploitasinya dengan efisien melalui kontrol secara intensif.

Tujuan Jepang di wilayah Kotaagung untuk mendapatkan bahan baku guna memenuhi kebutuhan perang dan kebutuhan industri. Sasaran utama dari eksploitasi adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Wilayah Kotaagung merupakan wilayah dengan tanah yang subur dan penduduk yang banyak. Jepang berusaha mengeksploitasinya dengan efisien mungkin melalui kontrol secara intensif.

Jepang membentuk 10 *Syu*/Keresidenan di Pulau Sumatera, , yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Palembang, Jambi, Bangka-Belitong, dan Lampung. Residen yang menjabat Karesidenan Lampung adalah residen militer kolonel Kurita Taisa yang dalam tugasnya dibantu oleh seorang kepala kepolisian bernama Sebakhira (Sutrisno Kutoyo, 1979 : 89-90).

Organisasi militer yang disiapkan untuk serangan Sekutu yang menyerang sewaktu-waktu, tentara militer Jepang membentuk organisasi-organisasi militer yang beranggotakan para pemuda-pemudi. Jepang membentuk Barisan Pemuda *Seinendan*. Demikian juga *Keibodan* untuk orang-orang dewasa, *Heiho* (pembantu tentara) juga diciptakan yang dapat dipersenjatai saat bertempur melawan Sekutu.

Pemerintahan pendudukan militer Jepang di wilayah Lampung, khususnya wilayah Kawedanaan Kotaagung tidak ada pembangunan kecuali pembuatan pos-pos pertahanan yang ada di daerah pantai dan pegunungan yang strategis. Selain itu, gudang-gudang tempat pengumpul dan penimbun barang-barang sebelum diangkut ke Jepang.

Kotaagung merupakan daerah pelabuhan, pembangunan cenderung dilakukan oleh pemerintahan militer Jepang. Pelabuhan Kotaagung pada masa Jepang sudah dibangun sebuah pelabuhan yang dermaganya sudah dilengkapi alat berat untuk bongkar muat kapal besar saat itu (Bahri, wawancara tanggal 27 Maret 2017).

Kedatangan tentara Jepang di Kotaagung tidak luput dari letak wilayah yang sangat baik. Wilayah Kotaagung selain memiliki sumber daya alam yang melimpah juga

memiliki wilayah yang strategis sehingga daerah tersebut sangat cocok dijadikan sebagai daerah pertahanan dan pangkalan militer untuk melindungi dari serangan musuh (H. Sunggono, wawancara tanggal 26 Maret 2017).

Wilayah Kotaagung memiliki peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi pada pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam hal system pemerintahan, pembentukan organisasi militer, ekonomi, dan sistem pertahanan.

Berdasarkan latar belakang di atas, membuat ketertarikan bagi peneliti untuk membahas Strategi Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang di Kotaagung Tahun 1942-1945.

Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi jugabisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Tjiptono, 2006:3). Strategi menurut W.J.S Poerwadarminta, adalah ilmu siasat perang, akal (tipu muslihat) untuk mencapai suatu maksud (W.J.S Poerwadarminta, 1988 : 965).

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Inu Kencana Syafie, 2001 : 22). Sedangkan menurut GK Manik, pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara, daerah atau badan tertinggi yang

memerintah suatu negara atau daerah (GK. Manila, 1996:17).

Adapun pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintahan militer. Pemerintahan Militer adalah pemerintahan yang dikusai oleh golongan militer atau pemerintah yang mengatur negara secara militer, sifat pemerintah militer adalah keras dan disiplin.

Pendudukan adalah dalam hukum perang, penempatan satuan angkatan perang, di suatu tempat atau daerah yang direbut untuk keperluan pertahanan, atau untuk menjaga tata tertib dan keamanan di masa perang. Biasanya pemerintah beralih ke tangan panglima-panglima tentara musuh. Hak-hak kekuasaan tentara serta pemerintah pendudukan diatur dalam peraturan-peraturan perang darat. (Depdikbud, 1991:26-29). Menurut W.J.S. Poerwadarminta mendefinisikan Pendudukan merupakan perbuatan yang menyangkut hal dan sebagainya menduduki suatu daerah dengan menggunakan tentara (W.J.S. Poerwadarminta 1984:731).

Pengertian militer berasal dari Bahasa Perancis *L Armee De La Terre* yang artinya bala tentara. Semula kata militer hanya bermakna angkatan darat tetapi kini militer berarti segala hal yang bersangkutan dengan komunitas militer pada umumnya, pertahanan, keamanan, dan angkatan bersenjata suatu negara (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991 : 310). Militer adalah suatu kelompok atau organisasi yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran pada medan peperangan yang dibedakan dari orang-orang sipil (Yahya A Muhaimin, 1982 : 1).

Pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam penelitian ini

adalah usaha penguasaan suatu wilayah secara paksa dan disiplin yang dilakukan oleh militer Jepang pada masa pendudukannya di wilayah Kotaagung.

METODE PENELITIAN

Menurut Helius Sjamsuddin, metode ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Helius Sjamsuddin, 2007 : 12). Menurut Daliman, Metode itu sendiri berarti suatu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien (Daliman, 2012 : 27).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis karena penelitian ini mengambil objek dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Metode penelitian historis adalah sekumpulan prinsip-prinsip aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasilnya (Notosusanto, 1984 : 11).

Menurut Nugroho Notosusanto langkah-langkah yang ada dalam penelitian historis, yaitu Heuristik adalah proses mencari mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah. Kritik adalah menyelidiki apakah jejak sejarah itu asli atau palsu. Interpretasi adalah setelah mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan maka kita harus merangkaikan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal. Historiografi adalah suatu kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil

penelitian (Nugroho Notosusanto, 1984 : 11).

Variabel adalah suatu konsep yang dinilai, sedangkan variabel dalam suatu penelitian merupakan hal yang paling utama karena merupakan suatu konsep dalam suatu penelitian. Variabel adalah sebuah konsep yang mempunyai nilai (Husaini Usman, 2003 : 7). Variabel yang digunakan adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada Strategi Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang di Kotaagung Tahun 1942-1945.

Informan adalah orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi penelitian. Syarat-syarat seorang informan adalah jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk pada kelompok yang bertentangan dengan latar belakang penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi (Moleong, 1998 : 90).

Informan dalam penelitian ini adalah : Bapak Rd. Eddy Kusnady Prawira, sebagai saksi hidup atau sumber primer. Bapak Bahri, sebagai *eks* anggota *Taisho*. Bapak Hi. Sunggono, sebagai *eks* anggota *Heiho*. Bapak Mad Tajrani, sebagai saksi hidup atau sumber primer. Bapak Sahundi, sebagai saksi hidup atau sumber primer.

Dalam suatu penelitian teknik pengumpulan data dan alat yang digunakan akan menentukan kualitas penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan masalah yang akan di bahas maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : Teknik kepustakaan juga dapat diartikan sebagai studi penelitian yang dilaksanakan dengan cara

mengumpulkan sumber-sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu melalui buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang terjadi (Nawawi, 1993 : 133).

Teknik dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan seperti kutipan-kutipan dari surat kabar, gambar-gambar, film-film yang mempertunjukkan peristiwa-peristiwa, pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan dalam masyarakat (W.J.S. Poerwadarminta, 1982 : 156). Menurut Notosusanto, teknik dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik berupa tulisan, lisan, gambar atau arkeologi (Notosusanto, 1986 : 38).

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data, merupakan suatu cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (Koentjoroningrat, 1977 : 81).

Teknik wawancara ini bagi penulis merupakan data yang sangat penting karena penulis bisa langsung bertanya kepada informan secara langsung mengenai strategi pemerintahan militer Jepang di Kotaagung tahun 1942-1945. Peneliti mengambil bentuk wawancara semi terstruktur karena wawancara ini tidak dibatasi atau bebas dan terbuka.

Teknik observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap objek ditempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada

bersama obyek yang diselidiki (Hadari Nawawi, 1987 : 100).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kualitatif maka data yang terdapat dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Koentjaraningrat, dalam penulisan menggunakan teknik analisis data kualitatif dikarenakan data yang terkumpul bersifat monografis atau kasus-kasus yang tidak berbentuk angka-angka yang tidak dapat diuji secara statistik (Koentjaraningrat, 1977 : 338).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan pendudukan militer Jepang tahun 1942-1945, wilayah Kotaagung adalah wilayah Kawedanan.

Keterlibatan Jepang dalam Perang Asia Pasifik merupakan sebuah awal Jepang menguasai wilayah Indonesia. Keterlibatan militer Jepang pada Perang Asia Pasifik dimulai ketika Jepang menyerang dan menghancurkan pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor. Kota Palembang merupakan wilayah pertama di Sumatera yang berhasil dikuasai oleh militer Jepang pada tanggal 14 Februari 1942 menjadi pintu gerbang untuk menguasai seluruh wilayah Sumatera.

Melalui udara Jepang menurunkan pasukannya antara lain di Kota Pelabuhan Kotaagung, Panjang. Demikian pula Kotabumi dan Menggala. Dari Panjang mereka bergerak ke Teluk Betung, Tanjungkarang, sedangkan pasukan yang diterjunkan di Kotaagung terus bergerak menuju Talangpadang kemudian pasukan langsung menuju Pringsewu, dengan Tanjungkarang

Teluk Betung sebagai sasaran terakhir (Anhar Gonggong, 1993 : 93-94).

Kedatangan Jepang di wilayah Kotaagung ditandai dengan masuknya Jepang di wilayah Lampung menjadi awal pendudukan Jepang di Kotaagung. Jepang menguasai Kotaagung sebagai salah satu basis pertahanan hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dibuat oleh tentara Jepang yang banyak terletak di pesisir pantai Kotaagung. Pesisir pantai wilayah Kotaagung tersebut sangat strategis yang terletak di Selat Semangka karena tentara Jepang dapat memantau pergerakan tentara Sekutu dari berbagai aspek yaitu udara, darat dan laut (Mat Tajrani, wawancara 23 Maret 2017).

Ketertarikan Jepang terhadap wilayah Kotaagung dikarenakan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kotaagung yang melimpah dan letak geografisnya yang strategis. Ada beberapa hal yang menjadikan perlu untuk dikuasai. Pertama, wilayah Kotaagung merupakan salah satu wilayah dengan hasil pertanian (pangan) berupa padi, sayuran dan buah-buahan serta tanaman jarak yang cukup melimpah. Kedua, Kotaagung terletak di jalur transportasi utama daerah-daerah yang memiliki perekonomian yang cukup baik dalam bidang pertanian.

Pemerintahan pendudukan militer Jepang berhasil menduduki wilayah Kotaagung, masyarakat Kotaagung lebih mengenal Jepang dengan sebutan "Nippon". Situasi Jepang di Kotaagung tergolong pada situasi yang aman dan tanpa hambatan. Hal ini dikarenakan Jepang yang sudah modern dan dapat

dengan mudah mengambil hati masyarakat.

Pusat komando tentara Jepang yang ada di wilayah Kotaagung bertempat di Kotaagung Pusat yang dapat dijumpai dengan banyaknya sarana dan prasarana yang dibuat oleh tentara Jepang seperti bangunan bunker, terowongan pertahanan, goa pertahanan, dan benteng pertahanan.

Deskripsi Strategi Pemerintahan Militer Jepang di Kotaagung Tahun 1942-1945

Membentuk Pemerintahan Baru

Berakhirnya pemerintahan Belanda, maka dimulailah kekuasaan dipegang oleh pemerintahan pendudukan militer Jepang. Dengan kekuasaan pemerintahan militer Jepang ini, maka segera menyusun pemerintahan di daerah yang harus membantu keinginan dan misi Jepang, yaitu untuk tercapainya kemenangan perang bagi Jepang. Sifat pemerintahan ini lebih tepat dikatakan sebagai pemerintahan pendudukan dari pada pemerintahan jajahan, sebab perang masih berlangsung dengan sengitnya. Adapun bentuk pemerintahannya adalah pemerintahan militer (Bayu Suryaningrat, 1981 : 68).

Berbeda pada masa pemerintahan Belanda yang bersifat pemerintahan sipil, sedangkan sistem pemerintahan Jepang lebih bersifat militer.

Pemerintahan pada masa Jepang dibagi menjadi tiga pemerintahan pendudukan militer, yaitu Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-16)

untuk Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta. Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Borneo, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar (Marwati Djoened Poesponegoro, dk, 2008 : 14).

Salah satu Karesidenan yang ada di wilayah Pulau Sumatera adalah Karesidenan Lampung yang dikepalai oleh seorang residen militer yang bernama Kolonel Kurita. Kolonel Kurita dibantu oleh seorang kepala kepolisian yang bernama Tsukabihara.

Setelah sistem pemerintahan karesidenan, terdapat kabupaten dan dibawahnya terdapat kawedanan yang dikepalai oleh seorang *Guncho* yang dijabat oleh orang Indonesia. Di bawah kawedanan terdapat keasistenan yang kemudian menjadi kecamatan yang diketuai oleh Asisten Demang (*Fuku Guncho*). Di bawah kecamatan ada system desa/kampung yang disebut *Ku*. Namun, di Lampung disebut *Son* dan yang mengepalai disebut *Sonoho*. Diangkatnya seorang *Cuko Sidokan* disetiap wilayah kawedanan yang berfungsi agar selalu setia pada atasan dan agar tidak menyimpang dari aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan militer Jepang.

Wilayah Kotaagung akhirnya menjadi salah satu wilayah kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang dan memperkuat kedudukannya sebagai penguasa, kemudian melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Pemerintahan pendudukan militer Jepang mengeluarkan undang-undang yang menetapkan sistem pemerintahan baru dan menghapus sistem pemerintahan lama yang

pernah digunakan pada masa penjajahan Belanda.

Kebijakan pemerintahan pendudukan militer Jepang seperti yang ada di wilayah Kotaagung, pemerintah militer memiliki tiga prinsip utama yaitu mengusahakan agar mendapatkan dukungan rakyat untuk memenangkan Perang Asia Pasifik, memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada, dan meletakkan dasar agar wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Setiap kawedanan diangkat *Ciko Sidokan* yang dijabat oleh orang Jepang dengan tugas utama mengawasi wedana agar langkah-langkah tidak menyimpang dari garis kependudukan.

Kawedanaan Kotaagung adalah salah satu wilayah yang ada di dalam Karesidenan Lampung. Wilayah ini membentang di sekitaran Teluk Semangka. Kotaagung memiliki sistem pemerintahan yang hampir sama dengan wilayah Kawedanan lainnya di Karesidenan Lampung.

Tahun 1944-1945, Kotaagung dipimpin oleh M. Efendi yang berpusat di Kotaagung Pusat, sedangkan untuk kedudukan Asisten Demang terletak di Talang Padang. Istilah *Pekon* untuk penyebutan desa masih tetap digunakan. Wilayah Kawedanan Kotaagung hampir seluruhnya adalah masuk ke dalam Kabupaten Tanggamus saat ini (Wawancara dengan Edi Prawira, 19 Maret 2017).

Peranan kalangan adat dalam melindungi masyarakat pribumi cukup baik walaupun tidak berpengaruh terlalu besar namun setidaknya dapat melindungi pribumi. Pada dasarnya, kebijakan

politik Jepang di Kotaagung mengikuti cara-cara di wilayah Indonesia lainnya yang mempunyai dua prioritas: yakni menghapuskan pengaruh barat di kalangan rakyat, dan memobilisasi mereka demi kemenangan tentara Jepang.

Membentuk Organisasi Militer

Sejak awal masa pendudukan Jepang, pemerintahan pendudukan militer Jepang telah merencanakan pembentukan satuan tentara cadangan dari penduduk pribumi yang berada di bawah kekuasaannya. Namun, pada mulanya tidak segera dilaksanakan karena angkatan perang Jepang masih terus-menerus meraih kemenangan sehingga mereka menganggap belum perlu mendapatkan dukungan militer dari penduduk lokal.

Pemerintahan pendudukan militer Jepang membuka organisasi kemiliteran yang diperuntukkan bagi pribumi dapat menjadi kesempatan yang amat berharga bagi pribumi untuk mendapatkan keahlian dan keterampilan terlatih di bidang kemiliteran. Adanya perekrutan pemuda pribumi oleh Jepang. Wilayah Karesidenan Lampung juga ikut terkena imbas untuk membentuk organisasi militer, hal ini juga terjadi di wilayah Kotaagung.

Banyak kalangan pemuda yang direkrut untuk menjadi tentara atau dididik kemiliteran dengan tujuan mengamankan Kotaagung atau membantu Jepang dalam perang yang sedang dilakukan. Para pemuda ini mendapat latihan kemiliteran terutama baris-berbaris. Para pemuda yang direkrut merupakan orang-orang pilihan (berani dan kuat) terutama yang ditunjuk untuk menjadi pasukan yang membantu langsung Jepang dalam berperang.

Pemuda ditingkat pekon/desa dikirim dan dikumpulkan di wilayah kawedanan, kemudian mereka diberangkatkan menuju tempat pendidikan di perkebunan Tanjung Jati (Hi. Sunggono, wawancara tanggal 26 Maret 2017).

Organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang guna menarik simpati dan membantu serdadu Jepang dalam menghadapi serangan balasan dari Sekutu di antaranya organisasi yang ikut dibentuk di wilayah Kotaagung adalah sebagai berikut : *Keibodan* merupakan salah organisasi semi militer yang dibentuk oleh pemerintahan pendudukan militer Jepang yang berada di wilayah Kotaagung. *Seinendan* juga merupakan organisasi buatan Jepang yang bersifat semi militer.

Heiho (*pembantu prajurit Jepang*) adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan para pemuda. Pembentukan *Giyugun* sebenarnya dikarenakan rencana darurat Jepang yang menginginkan pasukan tambahan yang akan ditugaskan di medan perang.

Mengganti Jenis Tanaman

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintahan pendudukan militer Jepang memiliki kebijakan yang berbeda dalam hal komoditas tanaman yang diwajibkan ditanam oleh masyarakat pribumi. Kebijakan pemerintahan pendudukan militer Jepang adalah menanam tanaman untuk kepentingan negara Jepang di arena Perang Asia Pasifik seperti tanaman jarak (*Rinicus Communis*).

Wilayah Kotaagung adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan wilayah Kotaagung

memiliki geografis yang beragam, mulai dari dataran tinggi hingga wilayah pesisir pantai yang strategis.

Salah satu alasan Jepang menguasai wilayah Kotaagung adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar industri dan perang di wilayah Asia Pasifik. Tanaman yang diwajibkan Jepang untuk kepentingan industri dan perangnya seperti menanam tanaman pohon jarak, kapas, jambu mete, jerami, pepaya, dan sebagainya. Hasil penanaman jarak dan jambu mete terbesar saat itu adalah Kawedanaan Kotaagung umumnya dan Talang Padang khususnya (Sutrisno Kutoyo, 1979 :91).

Adanya strategi pemerintahan pendudukan militer Jepang untuk mengganti jenis tanaman, banyak areal tanah pertanian yang ditanami tanaman wajib kebijakan Jepang dan adapula yang dibiarkan terbengkalai dikarenakan banyak kaum laki-laki yang dijadikan pekerja paksa untuk membangun sarana pertahanan di wilayah Kotaagung atau dikirim ke luar wilayah Kotaagung.

Barang-barang kebutuhan sehari-hari misalnya bahan makanan dan pakaian sangat jarang bahkan hampir tidak ada. Barang industri sangat sulit didapat terutama tekstil. Pakaian yang digunakan masyarakat pribumi adalah yang terbuat dari karung goni, kain rami atau kulit kayu (*ghulang*).

Pakaian yang dipakai sangat berat dan tidak nyaman, apalagi ketika basah akibat hujan mengakibatkan susah untuk berjalan (Bahri, wawancara tanggal 26 Maret 2017).

Membangun Sarana Pertahanan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan pendudukan

militer Jepang di Kotaagung adalah yang berhubungan dengan kemiliteran dan keamanan wilayah.

Strategi pemerintahan Jepang dalam mempertahankan wilayah kependudukannya adalah dengan membangun sarana pertahanan yang diharapkan akan mampu mempertahankan dan menyergap tentara Sekutu yang datang. Hal yang dilakukan oleh pemerintahan pendudukan militer Jepang ini sejalan dengan strategisnya letak wilayah Kotaagung khususnya wilayah di sekitaran teluk Semaka.

Salah satu kebijakan pertahanan yang dilakukan Jepang adalah penyempurnaan pada sistem pertahanan. Pemerintahan militer Jepang akhirnya membagi tingkat-tingkat pertahan ke dalam 3 tingkat pertahanan. Menurut rencana pertahanan Jepang, ada tiga lapis pertahanan yang dibuat pemerintahan Jepang, yaitu pertahanan pantai, pertahanan daratan rendah sampai daratan tinggi, dan pertahanan pegunungan/pedalaman (Alamsyah Ratu Perwira, 1987 : 41).

Wilayah Lampung satu-satunya kawedanaan yang tidak ada pengerahan tenaga romusha hanyalah Kawedanaan Kotaagung dengan maksud agar kelancaran pelabuhan Kotaagung waktu itu tidak terganggu akibat pengiriman romusha ke luar kawedanaan setempat, kecuali pengerahan tenaga dalam bentuk *romusha*, pengerahan kekayaan ekonomipun dilakukan di daerah ini (Sutrisno Kutoyo, 1979 : 93).

Pekerja yang disuruh membangun sarana pertahanan masih diperlakukan secara manusiawi, yaitu diberikan waktu istirahat pada jam 12 siang untuk sekedar makan siang yang dibawa sendiri. Apabila petang tiba, para pekerja disuruh pulang ke

rumah masing-masing. Namun sebelumnya mereka diabsen untuk mengetahui apakah para pekerja masih lengkap atau ada yang kurang (Mad Tajrani, 22 Maret 2017).

Sarana-sarana pertahanan Jepang yang dibangun oleh pemerintahan pendudukan militer Jepang di Kotaagung, sebagai berikut : bunker, terowongan pertahanan, benteng pertahanan/ pengawas, dan goa pertahanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintahan militer Jepang di Kotaagung tahun 1942-1945 adalah Membentuk pemerintahan baru yang awalnya berada di tangan pemerintahan Belanda berubah ke tangan pemerintahan militer Jepang.

Kawedanan merupakan bentuk pemerintahan yang ada di wilayah Kotaagung yang dipimpin oleh seorang wedana. Wilayah Kotaagung merupakan wilayah kekuasaan pemerintahan militer Jepang. Pada tahun 1944-1945, Kotaagung dipimpin oleh M. Efendi.

Membentuk organisasi militer merupakan staretgi pemerintahan Jepang di wilayah Kotaagung. Pusat pelatihan militer yang ada di wilayah Kotaagung berpusat di Perkebunan Tanjung Jati. Beberapa organisasi yang ikut dibentuk di wilayah Kotaagung adalah *Keibodan*, *Seinendan*, *Heiho*, dan Peta atau *Gyugun*.

Mengganti jenis tanaman pada wilayah Kotaagung yang awalnya pada pemerintahan kolonial Belanda lebih mementingkan pada penanaman tanaman yang dapat menguntungkan mereka dibidang perekonomian, sebaliknya yang dilakukan pemerintahan militer

Jepang mewajibkan masyarakat wilayah.

Wilayah Kotaagung pada masa pendudukan Jepang menanam tanaman jarak dan rami yang digunakan untuk mendukung majunya perindustrian Jepang dan untuk memenuhi kebutuhan perang.

Strategi pemerintahan Jepang dalam mempertahankan wilayah Kotaagung adalah membangun sarana pertahanan yang diharapkan akan mampu mempertahankan dan menyergap tentara sekutu yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Daliman A. 2012. *Metode Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta : Cipta Adi Pustaka.
- Gonggong, Anhar. 1993. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imprealisme dan Kolonialisme di Daerah Lampung*. Jakarta : CV. Manggala Bhakti.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Kutoyo, Sutrisno. 1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional di Daerah Lampung*. Teluk Betung : Depdikbud.
- Manila, GK. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Moleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Cv. Remaja Kosdakarya.

- Muhaimin, Yahya A. 1982. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia Tahun 1945-1966*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Notosusanto, Nugroho. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press.
- Perwiranegara, Alamsjah Ratu. 1987. *Peta dan Gyugun Cikal Bakal TNI*. Jakarta: YAPETA.
- Poerwadarminta, WJS. 1988. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.
- Suryaningrat, Bayu. 1981. *Sejarah Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta : Dewaruci Press
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta : Andi.
- Usman, Husaini. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Zed, Mestika. 2005. *Giyugun Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. LP3ES : Jakarta.
- Hasil Wawancara dengan Bahri, 27 Maret 2017.
- Hasil Wawancara dengan H. Sunggono, 26 Maret 2017.
- Hasil wawancara dengan Bapak Mat Tajrani, 23 Maret 2017.
- Hasil wawancara dengan Bapak Eddy Prawira, 19 Maret 2017.
- Hasil wawancara dengan Bapak Hi. Sunggono, 26 Maret 2017.
- Hasil wawancara dengan Bapak Mad Tajrani, 22 Maret 2017.